

# MORALITAS POLITIK DALAM PEMILU 2004 DAN IMPLIKASINYA BAGI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Oleh: Cholisin

Jurusan PPPK<sub>n</sub> Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta

## Abstrak

*Morality in general election 2004, a long way off from expected. Various actions which dissoluted political indication see clearly in course of and result of general election. Money politics, administrative collusion and crime by some of all legislative candidates, bureaucracy which not yet neutral politically, manipulation of voice enumeration, showing process of general election still not yet full respect the moral. General election also did not yet shown to yield all politician owning high binding (commitment) to respect the political morality. Its indication, general election not yet earned to yield the leader owning inner calm and trusted by people, general election tend to yield the politician principled weak politics party at ideology so that progressively strengthen to expand "political of corruption."*

*Not yet strength of political morality in general election 2004 represened factor which did not conducive for civic education, because real reference of citizen about how politicians have moral. This circumstance if let it can conducive to the belief crisis to existing political system. Therefore, study of civic education agreed with general election which require to be developed critically to form the rational and proportional attitude in general election. If this matter is done will be able to assist to overcome to expand belief crisis to general election and national of political system.*

**Kata kunci:** *Moralitas politik, Pemilu, Pendidikan Kewarganegaraan.*

## Pendahuluan

Bagaimana gambaran kondisi perkembangan demokrasi di Indonesia sebelum pelaksanaan pemilu 2004? Olle Tornquist<sup>1</sup>, pakar ilmu politik dari Universitas Oslo, Norwegia, menyatakan kegagalan gerakan prodemokrasi di Indonesia karena mengikuti gagasan *mainstream* dalam dunia internasional tentang demokrasi menekankan membangun institusi-institusi pada tingkat atas, menyerahkan urusan politik pada elite, dan prodemokrasi bergerak kembali pada *civil society*. Dengan pilihan ini, gerakan prodemokrasi merefleksikan sistem massa mengambang zaman Soeharto. Aktivis demokrasi terpecah-pecah, menyebar, tidak terorganisir, dan hampir-hampir tidak memiliki keterkaitan dengan rakyat. Mereka mirip demokrat-demokrat yang mengambang. Bila mereka tetap bertindak seperti itu dengan melakukan kontrol dan melakukan perlawanan terhadap negara, terus bekerja

<sup>1</sup> Olle Tornquist (2004), "Pemilu 2004, Kegagalan Gerakan Demokrasi", *Kompas*, 31 Januari.

dalam masyarakat sipil, kegiatan mereka tidak akan memberikan dampak yang baik. Tornquist menyarankan gerakan prodemokrasi perlu membentuk partai-partai kecil untuk ikutserta dalam pemilu lokal. Kemudian setelah pemilu partai-partai tersebut melakukan merger untuk memperluas pengaruhnya. Hal ini perlu agar gerakan prodemokrasi memiliki konstituen, mengorganisir massa dari bawah. Hal ini penting untuk menghindari politik dimonopoli oleh orang-orang buruk.

Sementara itu Greg Barton<sup>2</sup>, pengamat politik Indonesia dari Deakin University, Australia menyatakan "Reformasi harusnya datang dari eksekutif. Namun eksekutif yang sekarang adalah eksekutif yang sia-sia. Saya terus terang bingung melihat keadaan sekarang".

Sedangkan menurut Arif Budiman, kini terjadi dilema demokrasi di Indonesia. Disatu pihak sebetulnya demokratisasi di Indonesia sudah berjalan sejak didengungkan mahasiswa tahun 1998. Kemerdekaan pers dan kemerdekaan menyatakan pendapat sudah ada. Partai politik sudah ada dan lebih bebas dari parpol zaman Soeharto. Jadi demokrasi telah terjadi, tetapi yang mengisinya adalah para politisi busuk.

Ketika jauh sebelum dilangsungkan pemilu 2004, diberbagai daerah telah tercium adanya kasus caleg-caleg dari partai tertentu yang mengirim uang kepada kepala desa. Momen yang digunakan adalah bertepatan dengan Idul Fitri, sehingga ini sulit untuk dibuktikan, karena tradisi masyarakat menganggap bahwa itu hanya sekedar pemberian THR. Seorang kepala desa misalnya dikirim uang Rp 600 juta, sarung, dan lain-lain. Uang tersebut kemudian dibagi-bagikan ke tokoh-tokoh masyarakatnya yang jumlahnya mencapai 20 orang untuk setiap rukun tetangga, entah itu Ketua RT, tokoh agama, dan tokoh pemuda<sup>3</sup>.

Dengan perkataan lain, kondisi memasuki Pemilu 2004 bila dilihat dari kontestan yakni partai politik maupun para politisi, belum bisa diharapkan mampu melaksanakan pemilu dan hasil pemilu yang lebih baik. Dua hal inilah yakni partai politik dan para politisi bagaimana kiprahnya dalam pelaksanaan Pemilu 2004 akan dilihat dari moralitas politik dengan parameter demokrasi, dan apa implikasinya bagi pendidikan kewarganegaraan menjadi fokus pembahasan.

### Demokrasi sebagai Parameter Moralitas Politik

Bagaimanapun pemerintahan demokrasi lebih baik daripada pemerintahan otoriter/totaliter. Samuel P. Huntington menyatakan bahwa demokrasi merupakan salah satu *publik virtue*, namun bukan satu-satunya. Demokrasi hanya dapat dimengerti jika dibandingkan dengan sistem yang lain. Demokrasi menjadi pilihan terbaik bagi pengembangan kehidupan bernegara. Hal ini tampak pada nilai-nilai

<sup>2</sup> Greg Barton (2004) "Transisi Demokrasi Lewat Pemilu Bisa Kandas", *Kompas*, 30 Januari.

<sup>3</sup> Heru Cahyono (2004). Pelanggaran Pemilu Legislatif 2004, dalam *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 1, No.1, h. 15.

yang terkandung dalam demokrasi. Robert A. Dahl<sup>4</sup>, mengidentifikasi keuntungan dari demokrasi sebagai berikut :

1. Demokrasi menolong mencegah tumbuhnya pemerintahan oleh kaum otokrat yang kejam dan licik.
2. Demokrasi menjamin bagi warganegaranya dengan sejumlah HAM yang tidak diberikan dan tidak dapat diberikan oleh sistem-sistem yang tidak demokratis.
3. Demokrasi menjamin kebebasan pribadi yang lebih luas bagi warganegaranya daripada alternatif lain yang memungkinkan.
4. Demokrasi membantu rakyat untuk melindungi kepentingan dasarnya.
5. Hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi orang-orang untuk menggunakan kebebasab untuk menentukan nasibnya sendiri, yaitu untuk hidup di bawah hukum yang mereka pilih sendiri.
6. Hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat memberikan kesempatan sebesar-besarnya untuk menjalankan tanggungjawab moral.
7. Demokrasi membantu perkembangan manusia lebih total daripada alternatif lain yang memungkinkan.
8. Hanya pemerintahan yang demokratis yang dapat membantu perkembangan kadar persamaan politik yang relatif tinggi.
9. Negara-negara demokrasi perwakilan modern tidak berperang satu sama lain.
10. Negara-negara dengan pemerintahan demokratis cenderung lebih makmur daripada negara-negara dengan pemerintahan yang tidak demokratis.

Sedangkan Max Weber menggambarkan kelebihan demokrasi tidak memberikan jalan bagi korupsi, karena memiliki atribut: (1) kebebasan pers; (2) partai oposisi; (3) kekuasaan kehakiman yang independen merupakan kekuasaan yang dahsyat untuk menghantam dan mencegah korupsi. Tentang mengapa demokrasi sangat dibutuhkan Amartya Sen,<sup>5</sup> ilmuwan ekonomi yang mendapat hadiah nobel untuk ilmu ekonomi melihat dalam demokrasi memiliki fungsi intrinsik, instrumental, dan konstruktif. Fungsi instrinsik demokrasi sangat penting dan esensial untuk pertumbuhan seorang individu. Karena demokrasi memberikan lebih banyak kebebasan dan menjamin kebebasan itu dapat dinikmati. Dikatakan demokrasi memiliki fungsi instrumental, karena demokrasi merupakan sarana bagi pemerintah untuk mendapat dukungan dan pembenaran dari rakyatnya. Hal ini terjadi kalau pemerintah bersangkutan memperhatikan kebutuhan rakyatnya, memberikan respons cepat dan perhatian yang serius kepada keluhan, protes, atau tuntutan-tuntutan rakyat. Dalam hubungan inilah Amartya

<sup>4</sup> Robert A. Dahl. (2001). *Perihal Demokrasi : Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, h. 84-85.

<sup>5</sup> Lihat, Ignas Kleden (2004). *Masyarakat dan Negara : Sebuah Persoalan*. Magelang : INDONESIA TERATA, h. 66 -72.

Sen tampil dengan tesisnya yang sangat terkenal tentang hubungan demokrasi dan kelaparan. Dibuktikannya secara historis dan empiris bahwa kelaparan tidak disebabkan oleh kekurangan makanan, tetapi justru oleh kekurangan demokrasi.<sup>6</sup> Sedangkan fungsi konstruktif demokrasi, dimaksudkan demokrasi memberikan kesempatan kepada anggota dan warganya untuk menguji nilai-nilai budaya yang dianut oleh berbagai kelompok budaya melalui interaksi yang terbuka, juga kesempatan untuk pertukaran pikiran mengenai prioritas atau program politik dari masing-masing kelompok politik melalui diskusi dan perdebatan.

Dengan demikian kelebihan demokrasi tampak pada lebih menghormati HAM, memiliki *cleaning effect* (individu yang gagal bisa dicampakkan), memiliki kebebasan pers, partai oposisi, kekuasaan kehakiman yang independen, lebih dapat menjamin kesejahteraan masyarakat, mengkonstruksi berbagai program yang mendesak dibutuhkan masyarakat. Karena itu, demokrasi merupakan aspek etika politik yang penting. Sebab dalam etika politik menuntut agar kekuasaan sesuai dengan hukum yang berlaku (legalitas), disahkan secara demokratis (legitimasi demokratis), dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar moral (legitimasi moral). Ketiga tuntutan tersebut dapat disebut legitimasi normatif atau etis karena berdasarkan keyakinan bahwa kekuasaan hanya sah secara etis apabila sesuai dengan tuntutan tadi.<sup>7</sup> Dalam demokrasi itu sendiri terkandung prinsip-prinsip moral dan tidak mungkin terjadi konsolidasi demokrasi tanpa adanya penegakkan hukum. Sebab pelaksanaan demokrasi mengharuskan berdasarkan aturan main yang telah disepakati, untuk menghindari perilaku anarkis dan kesewenang-wenangan. Demokrasi mengharuskan setiap perubahan yang terjadi berjalan secara tertib, damai dan beradab.

Demokrasi sebagai moralitas politik, bukan berarti tanpa kelemahan. Winston Churchill, menyatakan demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang paling buruk (*the worst form of government*). Masalahnya kata Churchill, bentuk lainnya tidak lebih baik dari demokrasi. Untuk itu kiranya, sangat arif ketika Georg Sorenson<sup>8</sup>, menyatakan bahwa “demokrasi menawarkan peluang, bukan menawarkan keberhasilan”. Sehingga keberhasilan suatu negara demokrasi sangat tergantung

---

<sup>6</sup> Amartya Sen, antara lain mencontohkan kelaparan yang terjadi di Cina selama tiga tahun 1958 - 1961 yang menyebabkan kematian penduduknya, walaupun ekonomi Cina saat itu lebih baik keadaannya dari ekonomi India. Kelaparan terbesar dalam sejarah dunia ini disebabkan pemerintahan otoriter di Cina yang tidak memungkinkan penyaluran suara rakyat, juga suara yang menyatakan bahwa mereka tidak mempunyai suatu apa untuk dimakan. Sebaliknya kelaparan di India yang terjadi pada tahun 1943 (dan masih dialami oleh Amartya Sen sendiri) pada waktu India masih menjadikoloni Inggris dan harus menunggu empat tahun lagi merdeka pada 1947. Anehnya setelah India merdeka dan system multi partai mulai berfungsi dengan baik, maka kelaparan itu hilang. Demokrasi ternyata memberikan insentif politik yang luar biasa kepada pemerintah India yang baru terbentuk pada waktu itu. Lihat, Ignas Kleden (2004). *Masyarakat dan Negara .....*, h.71.

<sup>7</sup> Lihat, Cholisin (1994). Etika Politik dalam Perspektif Keilmuan dan Praktek Politik, dalam Jurnal *INFORMASI : Kajian Masalah Pendidikan dan Ilmu Sosial*, No. 1 Th. XXII, Februari, h. 68.

<sup>8</sup> Georg Sorenson. (2003). *Demokrasi dan Demokratisasi : Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia Yang Sedang Berubah*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, h. 163.

pada komitmen semua komponen bangsa untuk menjadikan demokrasi sebagai satu-satunya cara mengatasi berbagai masalah untuk mewujudkan tujuan bernegara yang dicita-citakan. Tanpa ada komitmen dari semua komponen bangsa, maka demokrasi akan kehilangan maknanya.

Oleh karena itu berpolitik yang bermoral sebenarnya parameter yang bisa digunakan adalah kesesuaian dengan nilai-nilai demokrasi dan konstitusi sebagai moralitas publik. Moralitas publik ini bersifat normatif (*das sollen*), namun disamping itu dikenal juga moralitas publik dalam tataran empirik (*das sein*). Moralitas publik yang bersifat empirik berupa tuntutan publik untuk mewujudkan kebaikan bersama untuk mengatasi masalah yang secara nyata sedang dihadapi publik. Moralitas publik pada masa transisi (reformasi) di Indonesia dewasa ini yang tampak menjadi tuntutan publik adalah pemerintahan yang demokratis, pemerintahan yang bersih dari KKN, adanya penegakkan hukum yang adil, elite yang empati terhadap krisis, solidaritas sosial yang tinggi, dan terwujudnya kesejahteraan rakyat.<sup>9</sup>

Demokrasi sebagai parameter moralitas politik, harus dipahami bagaimana praktek politik benar-benar sebagai penerapan konsep, teori, dan prinsip demokrasi itu sendiri. Konsep demokrasi, misalnya dikemukakan Joseph Schumpeter,<sup>10</sup> mengemukakan secara sederhana “demokrasi merupakan sebuah metode politik, sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin politik”. Kemudian, Sakuntala Kadirgamar -Rajasingham, Executive Senior pada lembaga Internasional IDEA yang bermarkas di Stockholme, Swedia, menyatakan: integral dengan konsep demokrasi adalah konsep kebebasan. Demokrasi adalah alat bukan tujuan. Untuk mencapai kebebasan demokrasi dilihat sebagai satu-satunya sistem politik yang menjamin kebebasan manusia. Kebebasan itu mencakup kebebasan sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Robert A. Dahl<sup>11</sup>, memberikan sumbangan pemikiran untuk mendefinisikan demokrasi sebagai sebuah sistem politik. Menurut Dahl, sifat dasar demokrasi ada pada responsifitas pemerintah terhadap preferensi warganegaranya yang setara

<sup>9</sup> Bandingkan dengan konsep Moralitas yang diajukan Said Aqil Siraj.(2003). “Islam dan Moralitas Politik”, *Republika*, 17 Oktober. Moralitas merupakan sesuatu yang dilakukan bukan diucapkan, tindakan bukan tulisan, pelaksanaan bukan kekuasaan, pengamalan bukan hapalan, kenyataan bukan penataran, esensi bukan teori, realitas bukan identitas, afektif bukan kognitif, dan seterusnya. Eksistensinya tidak bisa dibuat -buat, dipalsukan maupun sekedar simbolik. Canggihnya teori, banyaknya ajaran, tingginya kedudukan dan jabatan, indahnya paras wajah, melimpahnya harta bukanlah jaminan akan baiknya moral seseorang. Tidak mustahil orang yang miskin justru lebih moral ketimbang merka yang berduit, rakyat jelata lebih bermoral ketimbang pejabat. Moralitas yang luhur merupakan karakteristik ke-Tuhanan yang melekat pada diri manusia itu bersifat universal, kekal dan esensial. Tuhan akan memilih di antara hamba-hamba-Nya yang taat untuk menampakkan karakteristik tersebut. Perbedaan ras, golongan, suku bangsa, bahasa, negara bahkan agama tidak menjadi penghalang bagi realisasi moralitas mulia. Eksistensinya bersifat lintas etnis, lintas agama, budaya dan bahasa.

<sup>10</sup> Georg Sorensen (2003). *Demokrasi dan Demokratisasi* . . . ., h. 14.

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 18.

secara politis. Demokrasi sebagai sistem politik didefinisikan oleh Henry B. Mayo (1960) sebagai berikut: “*A democratic political system is one in which public policies are made on a majority basis, by representatives subject to effective popular control at periodic elections which are conducted on principle of political equality and under conditions of political freedom.*”<sup>12</sup>

Praktek politik yang demokratis, menurut Lyman Tower Sargent (1986) adalah dalam rangka mewujudkan unsur-unsur esensial demokrasi yaitu :

1. Keterlibatan warganegara dalam pembuatan keputusan politik;
2. Tingkat persamaan tertentu di antara warganegara;
3. Tingkat kebebasan atau kemerdekaan tertentu yang diakui dan dipakai oleh para warganegara;
4. Suatu sistem perwakilan;
5. Suatu sistem pemilihan kekuasaan mayoritas.<sup>13</sup>

Sedangkan Dahl<sup>14</sup>, mengemukakan terdapat tiga prinsip utama sebagai dasar pelaksanaan demokrasi. *Pertama*, kompetisi. Yakni kompetisi yang luas dan bermakna diantara individu dan kelompok organisasi (khususnya partai-partai politik) pada seluruh posisi kekuasaan pemerintah yang efektif, dalam jangka waktu yang teratur dan meniadakan penggunaan kekerasan.

*Kedua*, partisipasi. Yakni tingkat partisipasi yang inklusif dalam pemilihan pemimpin dan kebijakan, paling tidak melalui pemilihan bebas secara teratur, dan tidak ada kelompok sosial (dewasa) utama yang disingkirkan. *Ketiga*, kebebasan politik dan sipil. Yakni tingkat kebebasan politik dan sipil : kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan mendirikan dan menjadi anggota organisasi yang cukup untuk memastikan integritas partisipasi dan kompetisi politik.

Praktek politik yang berdasarkan demokrasi ternyata bervariasi. Variasi itu, terbukti dikenalnya demokrasi liberal, demokrasi non-Barat, dan demokrasi yang lain. Demokrasi liberal didasarkan pada liberalisme. Liberalisme dikembangkan sebagai perlawanan terhadap monarki despotis. Liberalisme menyerang sistem lama (monarki despotis) dalam dua hal<sup>15</sup>.

*Pertama*, kaum liberal berjuang untuk menurunkan kekuasaan negara dan menciptakan lingkungan masyarakat sipil (*civil society*) dimana hubungan-hubungan sosial, termasuk urusan pribadi, lembaga non-negara, keluarga, dapat berkembang tanpa campurtangan negara. Secara gradual, liberalisme dihubungkan dengan doktrin yang menyatakan bahwa individu seharusnya bebas mengejar pilihannya sendiri dalam persoalan agama, ekonomi dan politik, yang pada kenyataannya mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari. Elemen yang penting dalam hal ini adalah dukungannya terhadap ekonomi pasar.

<sup>12</sup> Henry B. Mayo (1960). *An Introduction to Democracy Theory*. New York : Oxford University Press.

<sup>13</sup> Lyman Tower Sargent (1986). *Ideologi Politik Kontemporer*. Jakarta : Bina Aksara, h. 44.

<sup>14</sup> Georg Sorenson.(2003). *Demokrasi dan Demokratisasi .....*, h. 19.

<sup>15</sup> *Ibid*, h. 5.

*Kedua*, kekuasaan negara tidak didasarkan pada hak-hak supranatural, melainkan pada kehendak rakyat. Klaim ini menyebabkan tuntutan penciptaan mekanisme perwakilan yang menjamin bahwa mereka yang memegang kekuasaan negara memperoleh dukungan rakyat.

Kemudian dalam perkembangan pemikiran demokrasi liberal menurut MacPherson,<sup>16</sup> dikenal tiga model, yaitu: 1) demokrasi protektif, 2) demokrasi pembangunan, dan 3) demokrasi ekuilibrium. Demokrasi protektif, menekankan pada perlindungan warga negara dari pemerintah dan upayanya dalam memastikan bahwa kebijakan yang dilaksanakan pemerintah sesuai dengan kepentingan warga negara secara keseluruhan. Juga menjamin perlindungan diri dengan menerapkan prinsip "satu orang satu suara". Demokrasi pembangunan, melihat demokrasi sebagai elemen penting dalam pembangunan SDM yang bebas. Partisipasi dalam kehidupan politik dapat menyebabkan pengembangan kapasitas pribadi tertinggi dan serasi. Demokrasi ekuilibrium, menekankan pentingnya mereformasi kapitalisme agar ketimpangan berkurang dan menjadi lebih demokratis, tidak terbatas pada urusan-urusan politik tetapi juga dalam kehidupan sosial dan ekonomi.

Sedangkan Demokrasi non-Barat (*eastern democracy*) atau dikenal sebagai Demokrasi Timur. Dimaksud Demokrasi Timur adalah demokrasi yang didasarkan pada ideologi sosialis/komunis. Uni Soviet, menyatakan dirinya sebagai negara "demokrasi sentralisme", RRC dengan "demokrasi rakyatnya". Klaim mereka bahwa demokrasi yang dikembangkan lebih murni (*genuine*), daripada demokrasi liberal yang merupakan demokrasi semu, karena mengandung unsur-unsur "penindasan" kapitalistik.

Bagaimana dengan cita-cita demokrasi di Indonesia? Baik pada masa pergerakan maupun pada saat menyusun UUD Indonesia merdeka, semua sependapat, agar demokrasi atau paham kedaulatan rakyat menjadi salah satu sendi Indonesia merdeka. Diakui ada berbagai visi diantara para anggota pergerakan dan penyusun UUD tentang demokrasi. Yamin dan Agus Salim, mengajukan prinsip permusyawaratan yang bersumber dari prinsip ajaran agama (khususnya Islam). Supomo, mengajukan visi bersumber budaya asli Indonesia. Hatta dan Soekarno, mengajukan visi yang didasarkan pada adat-istiadat Indonesia yang dipadukan dengan demokrasi modern.

Perbedaan visi atau pendekatan di atas, tidak mengurangi persamaan pendapat tentang corak demokrasi yang hendak dikembangkan di Indonesia. Persamaan tersebut :

*Pertama*, demokrasi tidak hanya diartikan hanya sebatas sistem politik, tetapi juga sebagai sistem sosial dan ekonomi. Dengan demikian demokrasi meliputi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Soekarno memberikan istilah sebagai

<sup>16</sup> Georg Sorenson (2003). *Demokrasi dan Demokratisasi.....*, h. 6.

“*socio democracie*”, Hatta menamakannya “demokrasi sosial”. Menurut Hatta,<sup>17</sup> sumber demokrasi sosial di Indonesia ada tiga, yaitu :

- 1) sosialisme Barat yang membela prinsip-prinsip humanisme, dan prinsip-prinsip ini juga dipandang sebagai tujuan.
- 2) Kedua, ajaran Islam yang memerintahkan kebenaran dan keadilan Tuhan dalam masyarakat.
- 3) Ketiga, pola hidup dalam kolektivisme sebagaimana yang terdapat di desa - desa Indonesia.

*Kedua*, dalam pengertian politik disepakati demokrasi yang hendak dijalankan bukanlah “duplikat” dari “*western democracy*” atau “*eastern democracy*”, Secara kelembagaan dipergunakan berbagai corak demokrasi modern seperti sistem perwakilan, kepartaian, pemilihan umum dan lain sebagainya. Tetapi mekanisme diangkat dari pranata sosial budaya asli seperti sistem permusyawaratan dalam pengambilan keputusan.

Tentang gambaran demokrasi politik Indonesia juga dapat diperoleh dari pandangan Notonagoro<sup>18</sup>, tentang sila ke IV bahwa kerakyatan dari sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat permusyawaratan perwakilan adalah kebebasan dan kekuasaan rakyat, sebagai pendukung kekuasaan (demokrasi politik) dan pendukung kepentingan (demokrasi fungsional) dalam lapangan kenegaraan atas dasar tritunggal “negara dari rakyat, bagi rakyat, dan oleh rakyat”. Karena susunan Pancasila bersifat hirarki piramida, maka Kerakyatan adalah yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia (berkebangsaan) dan berkeadilan sosial. Konsepsi demokrasi politik Indonesia sebagaimana digambarkan tersebut di atas, menunjukkan komitmen yang sangat kuat agar demokrasi dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip moral (moralitas politik) baik dalam substansi maupun prosedur.

### **Moralitas Politik dalam Pemilu 2004**

Berpolitik sebenarnya merupakan pergumulan bahkan konflik untuk memperjuangkan kepentingan. Kepentingan yang diperjuangkan bisa berupa : kekuasaan (paling utama), ekonomi, status, agama, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dll. Mengapa dorongan untuk berpolitik atau berebut kekuasaan sangat kuat, karena siapapun yang memiliki kekuasaan politik ia dalam posisi yang diuntungkan. Ia tidak hanya memiliki akses terhadap kekuasaan itu sendiri, tetapi dengan kekuasaan itu akan memperoleh berbagai fasilitas. Fasilitas itu baik yang berupa material maupun non- material. Orang berpolitik itu, ibaratnya ia akan berposisi sebagai pembagi kue. Yang tidak berpolitik dalam posisi yang menunggu

<sup>17</sup> Ahmad Syafii Maarif. (1985). *Islam dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta : LP3ES, h.156.

<sup>18</sup> Notonagoro (2004). Pancasila sebagai Pelita Penerang Kesulitan Bangsa, dalam Mubyarto (Editor). *Pancasila Dasar Negara, UGM & Jati Diri Bangsa*. Yogyakarta : PUSTEP-UGM, h. 97.

pembagian. Pembagian itu bisa saja tidak merata. Bahkan jangan -jangan kue itu dibagikan hanya terbatas antar pembagi itu sendiri (elit).

Melalui pemilu yang demokratis, sebenarnya dapat diharapkan memunculkan elit bermoral. Sebab, seperti dikatakan Kristadi<sup>19</sup>, pemilu demokratis adalah “perebutan kekuasaan yang dilakukan dengan regulasi, norma dan etika sehingga sirkulasi elit (pergantian kekuasaan) dapat dilakukan secara damai dan beradab”.

Di Indonesia seperti dikemukakan Todung Mulya Lubis, politik bukanlah profesi tetapi telah terpuruk menjadi proyek bisnis. Hal inilah yang menjadikan adanya lingkaran setan politik korupsi dan korupsi politik.<sup>20</sup> Syafii Ma'arif, memberikan istilah kecenderungan di Indonesia berpolitik sebagai “mata pencaharian”. Dalam masyarakat Indonesia lebih sering menggunakan istilah politik uang (*money politics*), ketimbang istilah korupsi politik. *Money politics* dilihat dari perspektif hukum pidana dan kriminologi, dapat dimasukkan dalam keempat tipe korupsi. Keempat tipe korupsi, yakni *political bribery*, *political kickbacks*, *election fraud*, dan *corrupt campaign practices*.<sup>21</sup>

Ambisi untuk memperoleh kekuasaan yang begitu besar tanpa mengindahkan moral, kemudian menghasilkan perilaku politik tingkat rendah (*low politics*). Sebutan politisi kodok (katak), politisi bunglon, politisi busuk menunjukkan adanya *low politics* ini. Hal ini dapat dilihat dalam proses Pemilu 2004 dari temuan Panwaslu telah terjadi sekitar 1148 pelanggaran. Pelanggaran itu termasuk unsur pidana

<sup>19</sup> Lance Castles (2004). *Pemilu 2004 Dalam Konteks Komparatif & Historis*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

<sup>20</sup> Todung Mulya Lubis (Ketua Dewan Pengurus Transparency International Indonesia) (2004). “Lingkaran Setan Politik Korupsi ke Korupsi Politik”. *Koran Tempo*, 9 Desember. Politik sebagai profesi merupakan tempat orang -orang yang sudah mapan merasa terpanggil “atas panggilan tugas” untuk mengabdikan kepada bangsa dan Negara. Contoh korupsi politik: merampas anggaran yang seyogyanya dicadangkan untuk fasilitas pelayanan publik, atau setidaknya menurunkan kuantitas dan kualitas fasilitas itu. Dirampoknya fasilitas ini membuat rakyat putus asa sehingga lahir konflik dan kekerasan. Kriminalitas pun merajalela. Sedangkan yang dimaksud Politik korupsi, maksudnya orang berpolitik dengan tujuan untuk melakukan korupsi politik. Misalnya, para pemimpin politik partai politik begitu getolnya berlomba -lomba memasukkan orang mereka ke jajaran kabinet dan jabatan strategis lain. Para menteri atau pejabat itu sudah dihadapkan pada beban harus menggerus dana untuk partainya dan tentunya untuk dirinya sendiri.

<sup>21</sup> Eddy OS Hiariej (2004). “*Money Politics*”, *Kompas*, 20 April. Hiariej, mengutip Pier Beirne & James Messerschmidt dalam *Criminology*, second edition, 1995, hlm. 295-296, bahwa *money politics* tidak dapat dipisahkan dari keempat tipe korupsi yang dikenal. Pertama, *political bribery*, yakni kegiatan dewan legislatif sebagai badan pembentuk undang -undang yang secara politis dikendalikan oleh suatu kepentingan golongan tertentu. Harapannya anggota dewan dapat membuat aturan yang menguntungkan golongan tersebut. Kedua, *political kickbacks* mempunyai cakupan yang lebih luas yang bisa berkaitan dengan kegiatan legislatif, yudikatif maupun eksekutif. Rumusan undang -undang adalah untuk melindungi kepentingan pengusaha. Ketiga, *election fraud*, berkaitan dengan kecurangan pada saat pemilu, seperti pemalsuan administrasi caleg, kecurangan pada saat penghitungan suara, memberikan sesuatu untuk mempengaruhi melaksanakan hak pilih yang semuanya itu berkaitan dengan dengan uang dan atau sesuatu imbalan termasuk di dalamnya menjanjikan mengiming-imingi sesuatu. Keempat adalah *corrupt campaign practices* adalah praktik -praktik kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara maupun uang Negara.

berupa pemalsuan surat dan ijazah untuk pencalonan anggota legislatif dan DPD.<sup>22</sup> Birokrasi-pun masih belum sepenuhnya netral. Hal ini terlihat pada beberapa kasus dimana aparat pemerintah secara terang-terangan melakukan kegiatan kampanye dan memobilisasi dan bahkan melakukan pencoblosan untuk mendukung Capres dan Cawapres tertentu. Kasus-kasus yang melibatkan birokrasi diantaranya: Kasus Tawao, Kasus Zaytun, dan Kasus Wali Kota Cirebon.<sup>23</sup> Oleh karena itu tak mengherankan apabila dalam Pemilu 2004 muncul gerakan kontrol terhadap para politisi yang dilakukan masyarakat/LSM. Misalnya, masyarakat mengkampanyekan untuk tidak memilih politisi busuk, politisi yang tidak peduli terhadap sistem pendidikan nasional, politisi berdarah, dll.<sup>24</sup>

Hutchcroft<sup>25</sup> ilmuwan politik dari Universitas Wisconsin, AS setelah membaca hasil sementara Pemilu Legislatif 2004 menyatakan bahwa pemilu tersebut menghasilkan tiga tipe kepemimpinan politik. Pertama, tipe pemimpin yang memiliki ketenangan batin (*inner calm*), tetapi tidak serta merta menimbulkan kepercayaan orang. Kedua, tipe pemimpin yang serta merta menimbulkan kepercayaan orang, namun tidak memiliki ketenangan batin. Ketiga, pemimpin yang tidak memiliki ketenangan batin dan tidak dipercayai orang.

Meskipun Hutchcroft, tidak sampai pada menunjuk siapa-siapa saja yang masuk dalam kategori kepemimpinan di atas, tetapi apabila mencermati hasil Pemilu 2004 memang dirasakan tampak belum mampu menghasilkan pemimpin (legislatif) yang *inner calm* dan dipercayai orang. Hal ini tentunya tidak terlepas dari kondisi partai politik yang belum mampu membentuk kader partai yang berkarakter memiliki komitmen yang tinggi terhadap moralitas publik. Lemahnya ideologi sebagai pembentuk karakter politisi di kalangan partai politik menjadi salah satu faktor tidak mudahnya membentuk politisi yang berkarakter tersebut. Hal ini bisa dilihat bagaimana kondisi partai politik pada Pemilu 2004. Partai politik peserta pemilu 2004 tampak masih berkuat sebagai partai elit, dimana pucuk pimpinan partai sebagai pusat kekuasaan. Kondisi ini kurang kondusif bagi upaya mewujudkan tujuan Reformasi 1998. Untuk kepentingan tujuan reformasi

---

<sup>22</sup> 1148 pelanggaran (hingga 3 Januari 2004 dari 21 provinsi), dengan rincian : 647 kasus di duga ada unsure pidana, Panwaslu telah melaporkan 152 ke pihak Polisi; 430 kasus administrasi, 130 kasus telah diserahkan ke KPU; sengketa 71 kasus, 53 telah ditangani Panwaslu, sebagaimana dimuat dalam *Kedaulatan Rakyat*, 27 Januari 2004.

<sup>23</sup> Lihat, *www. Tempointeraktif.com*. 16/07/2004. Kasus Tawao, sebanyak 8.000 surat suara untuk pasangan Yudhoyono-Kalla dicoblos sendiri oleh oknum konsulat Tawao, anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan pegawai swasta di Tawao, Malysia Timur. Kasus Al-Zaitun, ada mobilisasi pemilih dengan menggunakan kendaraan TNI, sedangkan kasus Wali Kota Cirebon, berkampanye kepada bawahannya untuk memilih Megawati.

<sup>24</sup> PRD mengajukan kriteria politisi busuk, adalah mereka yang ikut menikmati 32 tahun kekuasaan Orba, mengkhianati program reformasi, dan saat berkuasa gagal mengatasi krisis ekonomi dan politik. LSM tersebut misalnya, GEMPAR (Gerakan Rakyat Melawan Politisi Anti Rakyat) dideklarasikan 14 Januari 2004 dan diikuti lebih dari 40 organisasi di Jawa Barat; GNTPPP (Gerakan Nasional Tidak Pilih Politisi Busuk).

<sup>25</sup> Frans Seda.(2004). "Visi, Misi, dan Gizi Politik", *Kompas*, 27 Mei .

akan lebih memadai jika yang berkembang adalah tipe *Catch-all party*. Begitu pula akan menghambat pengembangan sistem multi partai sederhana (*moderate pluralism party system*) sebagaimana yang dianut UU no. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik.. Dalam sistem partai ini, ideologi yang dianut harus cukup longgar dan cair bagi kepentingan aliansi dan koalisi politik. Namun partai tampak masih terbelenggu oleh ideologi yang menguatkan sikap eksklusif. Akan tetapi sebenarnya keterikatan pada ideologi itu bersifat semu, karena sebenarnya yang terjadi adalah mengejar pembagian kekuasaan. Demikian masalah kondisi partai politik yang dipotret Riswanda Imawan<sup>26</sup>. Untuk mengatasi masalah tersebut Riswanda mengajukan tawaran untuk dikembangkan *Catch-all Party* yang berideologi. *Cath-all Party* yang berideologi ini, akan dapat menjadikan agenda politik yang ditawarkan menjadi jelas arahnya sehingga bisa mewarnai rejim politik.

Sebenarnya partai politik peserta Pemilu 2004 secara resmi-tidak resmi, dinyatakan-tidak dinyatakan memiliki ideologi (lihat Tabel 1 di bawah ini).

Tabel 1. Peta Ideologis Partai-partai Politik (*official-unofficial, declared-undeclared*)

Ideologi Islam	Ideologi Sosial Demokrat	Ideologi Nasionalis
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Islam Orthodox</i>: Partai Bulan Bintang;</li> <li>• <i>Islam Progresif</i>: Partai Keadilan Sejahtera;</li> <li>• <i>Islam Tradisionalis</i>: Partai Persatuan Nahdlatul Ummah, Partai persatuan pembangunan, Partai Bintang;</li> <li>• <i>Islam Modernis</i> Partai Amanat Nasional.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Progresif Kiri</i> : Partai Merdeka dan Partai Buruh Sosial democrat;</li> <li>• <i>Progresif Kanan</i> : Partai Perhimpunan Indonesia Baru;</li> <li>• <i>Konservatif Tengah</i> : Partai Sarikat Indonesia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Nasionalis Populis</i> (Marhaenisme; Sosialisme Indonesia) : PNI Marhaenisme; Partai Nasional Banteng Kemerdekaan; Partai Penegak Demokrasi Indonesia, Partai Pelopor;</li> <li>• <i>Nasionalisme Negara</i> (State Developmentalism) Partai Golkar, PDI Perjuangan, Partai Patriot Pancasila; Partai Keadilan dan Persatuan.</li> <li>• <i>Nasionalis Raligi</i> (Islam Kebangsaan) : Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Damai Sejahtera, Partai Karya Peduli Bangsa;</li> <li>• <i>Nasionalis Demokrat</i> (Nation State) : Partai Demokrat;</li> <li>• <i>Nasionalis Progresif</i> (Nasional Pluralis) : Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan dan Partai Persatuan Daerah.</li> </ul>

Sumber: Diolah dari Daniel Sparringa (2004). "Pemilu 2004: Taksonomi Tema dan Isu Relevan", dalam M. Farid Cahyono dan Lambang Triyono ,Editor. *Pemilu 2004 Transisi Demokrasi dan Kekerasan*, h. 21-22.

Ideologi -ideologi partai politik di Indonesia memang beragam dan cenderung makin mencair. Hal itu bisa dilihat pada terjadinya koalisi antara partai politik yang berbeda/berjarak ideologi. Misalnya , menjelang pemilihan Presiden tahap kedua,

<sup>26</sup> Riswanda Imawan (2004). Partai Politik Di Indonesia : Pergulatan Setengah Hati Mencari Jati Diri. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Politik pada FISIP UGM, tanggal 4 September, di Yogyakarta, h. 19 -24. *Catch -all party* memfasilitasi alur politik dari atas, atau sebaliknya dari bawah ke atas, seraya secara horizontal menyerap berbagai kelompok yang ada dalam masyarakat. Format kepartaian ini menjamin representasi aspirasi dari kelompok masyarakat secara lebih luas dibandingkan dengan format partai elit atau partai massa. Hanya saja kelemahan format *cath -all party*, yakni dikesampingkannya ideologi dan persepsi terhadap ideology itu sendiri harus dikoreksi, sebab berpotensi memunculkan oligarki dalam tubuh partai dan situasi *chaotic*.

20 September 2004 muncul Koalisi Kebangsaan (KK) dan Koalisi Kerakyatan (KKr). KK yang terdiri dari PDI-P, Partai Golkar, PPP, PDS dan PBR. Sedangkan KKr terdiri atas Partai Demokrat, FKPI, PBB dan PKS. Polarisasi ini menurut Tamrin Amal Tomagola (2004) membelah bangsa ini menurut garis wilayah, kelas, tingkat modernitas dan ideologi. Polarisasi ini berkutub saling berseberangan dengan titik singgung yang terbatas, kekentalan luar-Jawa versus kekentalan Jawa, perkotaan vs pedesaan, kelas menengah vs kelas bawah, modernis vs tradisional, individualisme vs komunalisme dan dominasi sipil vs dominasi militer.

Koalisi di atas tampak masih berlanjut. Pemilu 2004 menghasilkan parlemen dengan komposisi dua kubu yang saling berhadapan. Yakni kubu Koalisi Kebangsaan dan Koalisi Kerakyatan. Sukardi Rinakit<sup>27</sup>, melihat Koalisi Kerakyatan sedang menerapkan prinsip berpolitik "*Savantisme*" dan Koalisi Kebangsaan menerapkan prinsip "*Parle*". Kelompok *savantisme* ini sebagai pemain baru dan sedang belajar di Senayan, mereka mencoba mengusung praktek berpolitik bermoral, dengan melakukan kontrol internal (terhadap politisi senior) agar tak bisa semena-mena menafsirkan peraturan yang ada (terutama yang berkaitan dengan pemilihan ketua komisi DPR). Mereka terkesan keras kepala, dan membuat kesan publik sibuk berebut ketua komisi, yang bisa menjadikan pemerintah tidak dapat bekerja optimum. Sedangkan berpolitik dengan menerapkan prinsip "*Parle*"(bicara). Mereka pemain lama yang biasa bermanuver politik demi sebuah kursi. Tetapi manuver politik mereka tetap dalam koridor peraturan yang ada. Bagi mereka perjuangan memenangkan kepentingan kelompok ada di dalam gedung parlemen. Sekali para politisi yang baru belajar mencoba *walk -out* dari ruang sidang, mereka akan digulung aneka keputusan yang menguntungkan kelompok *parle*. Realitas politik demikian merupakan pelajaran berharga bagi para *savantis* yang sudah merasa benar saat mengangkat alasan etika politik dalam argumennya.

Gambaran polarisasi di atas, tampak memberikan kesan masih kentalnya dasar ideologi atau aliran, tetapi kesan yang lebih kuat koalisi itu

dibangun atas dasar bagi-bagi kekuasaan ("politik dagang sapi"). Dalam kenyataan, ada kecenderungan pragmatisme dan materialisme-lah yang menjadi ideologi partai politik. Berpolitik untuk memperjuangkan idealisme seperti yang tercermin dalam ideologi politik merupakan barang langka. Berpolitik untuk memperjuangkan kepentingan publik telah berganti sebagai mata pencaharian. Berbagai kasus korupsi dikalangan pejabat publik di pusat maupun daerah mencerminkan melemahnya moralitas publik. Padahal moralitas publik merupakan perekat bangsa. Karena dalam moralitas publik kewenangan para pejabat/politisi dalam membuat dan melaksanakan kebijakan, kewenangan mengalokasikan anggaran, proyek, jabatan, dan pelayanan publik, dan pengadaan dan penggunaan asset pemerintah harus diperuntukan bagi kepentingan publik, untuk semua warga negara tanpa diskriminasi.

<sup>27</sup> Sukardi Rinakit (2004). "Kunang-kunang Politik", *Kompas*, 4 Nopember .

Kekecewaan terhadap perilaku politisi dan kondisi partai politik pada pemilu 2004 tampak ditandai dengan maraknya *swinging voters*, *protest voters*, *split voting*.<sup>28</sup> Meskipun demikian, IFES menemukan pendapat rakyat mengenai proses pemilu jauh lebih positif. Hanya 3% yang menganggap pemilu tidak fair, plus 10% yang menganggap pemilu tidak begitu fair. Antara pendukung masing-masing calon, tidak banyak perbedaan. Separuh dari mereka yang melihat sesuatu tidak fair menyinggung surat suara yang rusak, tetapi hanya menyalahkan kekurangan *voter education*. Seperempat menyinggung *money politics* sebagai *unfair*. Hanya 9% dari responden menganggap pemilu tidak terorganisir rapih.<sup>29</sup> Memang harus diakui dengan pemilihan Presiden secara langsung pemilu 2004 memiliki bobot tersendiri, tetapi apabila melihat dalam proses dengan adanya birokrasi yang belum sepenuhnya bersikap netral merupakan kemunduran dibandingkan dengan pemilu 1999 dimana birokrasi dapat dinyatakan netral. Dengan demikian pemilu 2004 masih diwarnai berbagai perilaku yang mencerminkan belum adanya komitmen yang kuat untuk menegakkan moralitas politik.

### Implikasi terhadap Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education*) bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik (*good citizen*). Warga negara yang baik adalah warga negara yang demokratis, yakni warga negara yang mampu berpartisipasi secara bertanggung jawab. Oleh karena itu melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) setiap warga negara perlu diberikan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), ketrampilan kewarganegaraan (*civic skills*) yang meliputi ketrampilan intelektual dan partisipasi, dan pengembangan karakter kewarganegaraan (*civic dispositions*). Karakter kewarganegaraan, seperti keharuan/memiliki perasaan kasihan terutama bagi mereka yang tidak beruntung, jujur, menghormati hak-hak orang lain, keberadaban, keteguhan hati, dan sebagainya<sup>30</sup>.

<sup>28</sup> Riswanda, memaknai faktor maraknya *swinging voters*, *protest voters*, *split voting* sebagai produk dari semakin mampunya masyarakat mengambil jarak dengan proses politik sehingga mereka mampu mereorientasi konsepsi kekuasaan (*civic disengagement*) menunjukkan kejenuhan masyarakat akan pola berpolitik yang dikembangkan para elit. Tambahan pula tingginya angka golongan putih (golput) pada pemilu legislatif (23.26%) dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran pertama (25,692%) dalam rangkaian pemilu 2004, mengindikasikan ada kesenjangan antara preferensi elit dengan preferensi massa yang gagal dijabatani partai politik melalui pelaksanaan fungsi-fungsinya. Bila tidak diakhiri, bukan mustahil tingkat kepercayaan masyarakat kepada partai-partai politik akan menuju titik nadhir, yang tentu saja tidak kondusif bagi institusionalisasi kehidupan politik sebagai pilar penunjang bangun demokrasi yang sehat. Kita hanya akan melihat massa yang mengambang dan partai yang mengapung tak tentu arahnya. Lihat, Riswanda Imawan (2004). *Partai Politik di Indonesia*....., h. 21 -22.

<sup>29</sup> Lance Castles (2004). *Pemilu 2004 Dalam Konteks Komparatif & Historis*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, h. 81 -82.

<sup>30</sup> Lihat Cholisin (2004). Konsolidasi Demokrasi Melalui Pengembangan Karakter Kewarganegaraan, *Jurnal Civics : Media Kajian Kewarganegaraan*, Volume 1, Nomor 1, Juni, h. 22 -23.

Tentang konsep Pendidikan Kewarganegaraan, Civitas International<sup>31</sup>, menyatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan yang efektif mencakup beberapa hal. *Pertama*, pemahaman dasar tentang cara kerja demokrasi dan lembaga-lembaganya. *Kedua*, pemahaman tentang *rule of law*, dan HAM seperti tercermin dalam perumusan-perumusan, perjanjian dan kesepakatan internasional dan lokal. *Ketiga*, penguatan ketrampilan partisipatif yang akan memberdayakan peserta didik untuk merespon dan memecahkan masalah-masalah masyarakat mereka secara demokratis. *Keempat*, pengembangan budaya demokrasi dan perdamaian pada lembaga pendidikan dan seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Sementara itu, Daniel Dhakidae<sup>32</sup> menyatakan Pendidikan Kewarganegaraan memberikan kemungkinan pencarian sendiri jenis artkulasinya di dalam perjalanan hidup politik sehari-hari. Karena itu pendidikan kewarganegaraan adalah campuran dari berbagai hal dibawah ini : suatu pendidikan yang menuntut kerja sama antar warga, *partnership*, hidup bersama dengan orang lain dan hidup untuk orang lain, dan dengan itu seorang menghidupi dirinya sendiri, karena dirinya akan semakin kaya dengan memberikan semakin banyak kepada yang lain, sebagai pendidikan etis pribadi, dan sebagai pendidikan hati nurani. Di pihak lain harus juga diperkenalkan tentang konflik, kritik, dan kemampuan memberikan kritik terhadap politik dan ekonomi, ia juga berarti penyadaran tentang emansipasi, suatu sikap anti-otoriter di satu pihak dan pengolahan rasionalitas terkendali di pihak lain.

Dalam pemilu 2004 sudah terlihat adanya kebebasan penggunaan hak memilih, indikasinya misalnya adanya "*swinging voters*". Namun pelanggaran dari yang bersifat administratif sampai kriminal masih banyak terjadi dalam proses pemilu 2004. Birokrasi-pun belum sepenuhnya netral. Pemilu 2004 juga belum menghasilkan pemimpin atau politisi *inner calm* dan dipercayai rakyat, karena politisi yang dihasilkan perilaku politiknya masih didominasi oleh kepentingan material (proyek bisnis) atau politisi "*Parle*". Begitu pula partai politik sebagai kontestan pemilu, tidak pernah secara serius berjuang berdasarkan nilai-nilai ideologi partai sehingga tidak akan pernah mampu mewarnai rezim. Partai apapun yang menang ada kecenderungan memiliki orientasi yang sama yaitu mengembangkan "politik korupsi" sebagai instrumen untuk melakukan "korupsi politik".

---

<sup>31</sup> *Civitas Internasional* dibentuk di Praha pada tahun 1995, oleh tidak kurang 450 pemuka pendidikan demokrasi dari 52 negara, memandang pentingnya pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi sangat penting bagi penumbuhan *civic culture* untuk keberhasilan pengembangan dan pemeliharaan pemerintah demokratis (*democratic governance*). Pendidikan demokrasi dalam banyak hal identik dengan Pendidikan Kewargaan atau Pendidikan Kewarganegaraan (*civic education*). Lihat, Azyumardi Azra (2001). "Pendidikan Kewarganegaraan dan Demokrasi", *Kompas*, 21 Februari.

<sup>32</sup> Daniel Dhakidae (2001). Sistem sebagai Totalitasi, Masyarakat Warga, dan Pergulatan Demokrasi, dalam St. Sularto (Eds.). *Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas.

Kondisi proses dan hasil pemilu 2004 yang masih memperlihatkan kurangnya menjunjung tinggi moralitas politik sebagaimana digambarkan di atas, menjadikan Pendidikan Kewarganegaraan kehilangan referensi empirik tentang pelaksanaan prinsip-prinsip berpolitik yang bermoral (demokratis). Atau menurut istilah Muji Sutrisno, ““Elit nasional kini lahir dari ketiadaan pendidikan politik yang memadai. Bangsa ini tidak mempunyai guru politik yang baik, yang dapat mengajarkan bagaimana berpolitik tak hanya merebutkan kekuasaan, namun dengan penghayatan etika serta moral. Politik yang mengedepankan *take and give*, berkonsensus, dan pengorbanan”<sup>33</sup> Demokrasi yang ditemukan oleh anak didik dalam kehidupan politik sehari-hari baru sebatas wacana. Hal ini dapat mempersulit upaya mengembangkan kepercayaan (*trust*) dan harapan-harapan terhadap sistem politik demokrasi pada peserta didik. Menipisnya kepercayaan dan harapan tersebut, dapat mendorong terbentuknya sikap acuh-tak acuh terhadap masalah-masalah politik. Jika dibiarkan dapat mendorong berkembangnya warga negara yang pasif.

Untuk itu perlu upaya untuk mencegah kemungkinan berkembangnya pengaruh negatif tersebut. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah menjadikan berbagai perilaku yang mencerminkan masih lemahnya moralitas politik dalam pemilu 2004, diangkat sebagai permasalahan, kemudian didiskusikan untuk dicarikan solusinya. Atau juga bisa dijadikan pangkal tolak untuk melihat posisi/sikap peserta didik terhadap berbagai perilaku tak bermoral dalam pemilu 2004. Dalam hal ini anak diminta apakah setuju/tidak setuju terhadap obyek (moralitas politik dalam pemilu 2004), dengan memberikan alasan-alasan berdasarkan nilai-nilai normatif maupun berpikir secara rasional. Ini berarti pengembangan berpikir kritis dan pengambilan posisi/sikap warga negara secara rasional dan proporsional, telah dicoba untuk dikembangkan dalam kondisi atmosfer perpolitikan yang kurang menguntungkan. Dengan demikian, dalam kondisi perpolitikan nasional sekalipun tidak menguntungkan dilihat dari jendela pendidikan kewarganegaraan, pendidikan kewarganegaraan tetap tidak akan kehilangan arah dalam mengembangkan kemampuan partisipasi warga negara secara bertanggung jawab.

### Daftar Pustaka

- Azra, Azyumardi (2001).”Pendidikan Kewarganegaraan dan Demokrasi”, *Kompas*, 21 Februari.
- Barton, Greg. (2004). “Transisi Demokrasi Lewat Pemilu Bisa Kandas”, *Kompas*, 30 Januari .

<sup>33</sup> Lihat, Muji Sutrisno, Elite Berpolitik Tanpa Moral, [www.yahoo.com](http://www.yahoo.com), 01/10/2004.

- Cahyono, Heru, (2004). Pelanggaran Pemilu Legislatif 2004, dalam *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 1, No.1, h. 15.
- Castles, Lance, 2004, *Pemilu 2004 Dalam Konteks Komparatif & Historis*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Cholisin. (2004). Konsolidasi Demokrasi Melalui Pengembangan Karakter Kewarganegaraan, *Jurnal Civics : Media Kajian Kewarganegaraan*, Volume 1, Nomor 1, Juni, h. 22 -23.
- Cholisin. (1994). Etika Politik dalam Perspektif Keilmuan dan Praktek Politik, dalam *Jurnal INFORMASI : Kajian Masalah Pendidikan dan Ilmu Sosial*, No. 1 Th. XXII, Februari, h. 68.
- Dahl, Robert A., (2001). *Demokrasi : Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi* Jakarta Yayasan Obor Indonesia.
- Dhakidae, Daniel (2001). Sistem sebagai Totalitasi, Masyarakat Warga, dan Pergulatan Demokrasi, dalam St. Sularto (Eds.). *Masyarakat Warga dan Pergulatan Demokrasi*. Jakarta : Penerbit Buku Kompas.
- Hiariej, Eddy OS. (2004). "Money Politics", *Kompas*, 20 April .
- Imawan, Riswanda. (2004). Partai Politik Di Indonesia : Pergulatan Setengah Hati Mencari Jati Diri. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Politik pada FISIP UGM, tanggal 4 September, di Yogyakarta
- Lubis, Todung Mulya .(2004). "Lingkar Setan Politik Korupsi ke Korupsi Politik". *Koran Tempo*, 9 Desember .
- Maarif, Ahmad Syafii .(1985). *Islam dan Masalah Kenegaraan*. Jakarta : LP3ES
- Mayo, Henry B. (1960). *An Introduction to Democracy Theory*. New York : Oxford University Press.
- Notonagoro .(2004). Pancasila sebagai Pelita Penerang Kesulitan Bangsa, dalam Mubyarto (Editor). *Pancasila Dasar Negara, UGM & Jati Diri Bangsa*. Yogyakarta : PUSTEP-UGM, h. 97.
- Rinakit, Sukardi. (2004). "Kunang -kunang Politik", *Kompas*, 4 Nopember.
- Sargent, Lyman Tower .(1986). *Ideologi Politik Kontemporer*. Jakarta : Bina Aksara.
- Seda, Frans. (2004). "Visi, Misi, dan Gizi Politik", *Kompas*, 27 Mei .
- Sorenson, Georg (2003). *Demokrasi dan Demokratisasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar kerjasama dengan *Center for Critical Social Studies*.
- Siraj, Said Aqil.(2003). "Islam dan Moralitas Politik", *Republika*, 17 Oktober .

Sparringa, Daniel. Pemilu 2004: Taksonomi Tema dan Isu Relevan, dalam M. Farid Cahyono dan Lambang Triyono ,Editor. *Pemilu 2004 Transisi Demokrasi dan Kekerasan*, h. 21-22.

Sutrisno, Muji. Elite Berpolitik Tanpa Moral, *www.yahoo.com.*, 01/10/2004.

Tornquist, Olle. (2004). "Pemilu 2004, Kegagalan Gerakan Demokrasi", *Kompas*, 31 Januari